



SIMAK  **BPK RI**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Tahun 2023

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



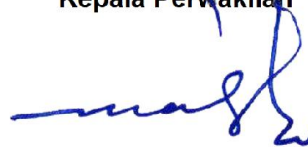
Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun 2023 dan sebagai salah satu media komunikasi penyampaian informasi kinerja kepada *stakeholders*.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis BPK serta strategi Auditorat Utama Keuangan Negara VI sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menyajikan informasi capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas tiga belas Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipahami dengan baik dan dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan.

Palangka Raya, 30 Januari 2024
Kepala Perwakilan



M. Ali Asyhar
NIP 196909291996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. SUMBER DAYA.....	7
E. ISU STRATEGIS.....	12
BAB II - PERENCANAAN STRATEGIS	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	13
B. TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	18
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. HASIL EVALUASI AKIP	24
B. CAPAIAN KINERJA	25
C. ANALISIS EFISIENSI.....	61
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA.....	64
E. REALISASI ANGGARAN	65
F. INOVASI	66
G. PENGHARGAAN	68
BAB IV – PENUTUP.....	73
LAMPIRAN	v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional	9
Tabel 2 Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan Lainnya	9
Tabel 3 Rincian dan Anggaran RKP Tahun 2023.....	11
Tabel 4 Rincian dan Anggaran RKSP Tahun 2023	11
Tabel 5 Perubahan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	19
Tabel 6 Kegiatan Utama dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	20
Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	26
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir.....	29
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun.....	30
Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024	31
Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024	34
Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024	36
Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024	41
Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024	43
Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024	44
Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024	47
Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024	49
Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024	51
Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024	54
Tabel 21 Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024	55
Tabel 22 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024	58
Tabel 23 Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	65
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	4
Gambar 2 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Golongan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	8
Gambar 3 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Unit Kerja dan Usia.....	8
Gambar 4 Profil Pegawai TTT Berdasarkan Jabatan, Unit Kerja dan Jenis Kelamin	10
Gambar 5 Profil TTT Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja	10
Gambar 6 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	16
Gambar 7 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	17
Gambar 8 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	19
Gambar 9 Tren Skor Kinerja Tahun 2021 s.d. 2023	26
Gambar 10 Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2023	37
Gambar 11 Kegiatan KTF <i>Big Data Analytic</i>	52
Gambar 12 Piagam Penghargaan LHP <i>Reward</i> Tahun 2022.....	69
Gambar 13 Piagam Penghargaan Adi Kirtya Arthasantosha Tahun 2022	69
Gambar 14 Piagam Penghargaan UJDIH Zona Hijau dan Pengelola UJDIH Terbaik.....	69
Gambar 15 Piagam Penghargaan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan.....	70
Gambar 16 Penghargaan Vera Award Kategori DIPA Besar.....	70
Gambar 17 Piagam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2023.....	71
Gambar 18 Penghargaan Kinerja Penyusunan Laporan UAPPA-W Tahun 2022.....	71
Gambar 19 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

BAB

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan maka perlu disusun suatu Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penerapan peraturan tersebut di Badan Pemeriksa Keuangan salah satunya dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPK serta strategi Auditorat Utama Keuangan Negara VI sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Laporan Kinerja disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel atas kinerja suatu instansi pemerintah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

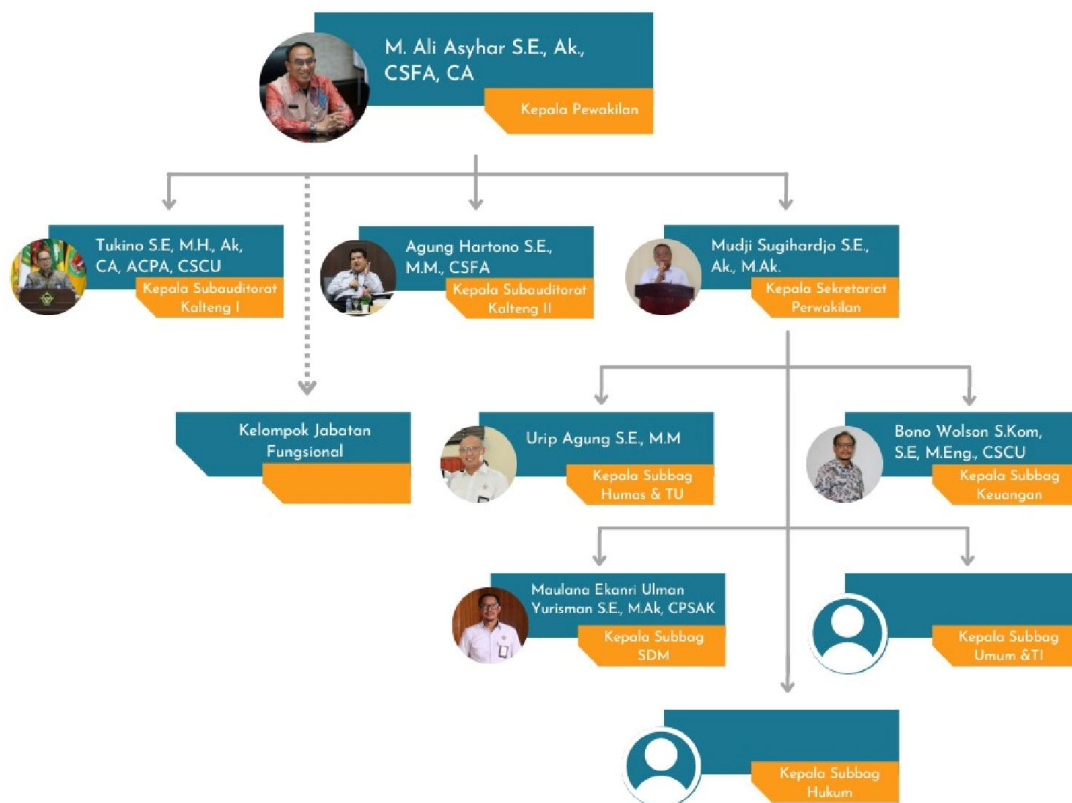
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana tertuang dalam pasal 615 pasal (1) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI dan pasal (2) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Berikut struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember Tahun 2023.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun tugas dalam struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler

serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Subauditorat Kalimantan Tengah I

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

a. Merumuskan rencana kegiatan;

- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Subauditorat Kalimantan Tengah II

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD , dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- g. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

D. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

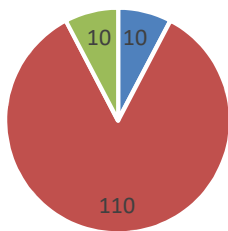
BPK telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional dengan menerapkan Human Resources Management Plan (HRM Plan) di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan, dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sumber Daya Manusia pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 3 orang Kepala Subbagian, 94 orang pegawai pemeriksa, 29 orang pegawai penunjang, 1 orang pegawai PPPK, 3 orang pegawai CPNS dan 20 orang Tenaga Tidak Tetap.

Berikut statistik pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Tidak Tetap.

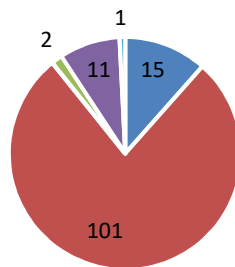
Statistik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai PNS Berdasarkan Golongan



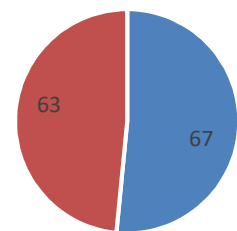
■ Gol IV ■ Gol III ■ Gol II

Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan



■ S-2 ■ S-1 ■ D-IV ■ D-III ■ SLTA/SMK

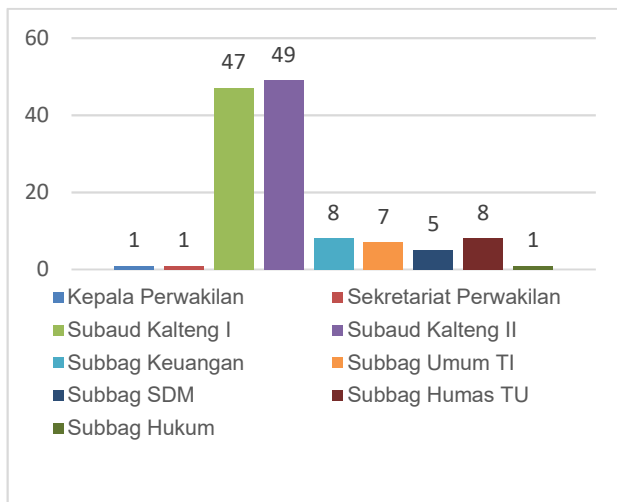
Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



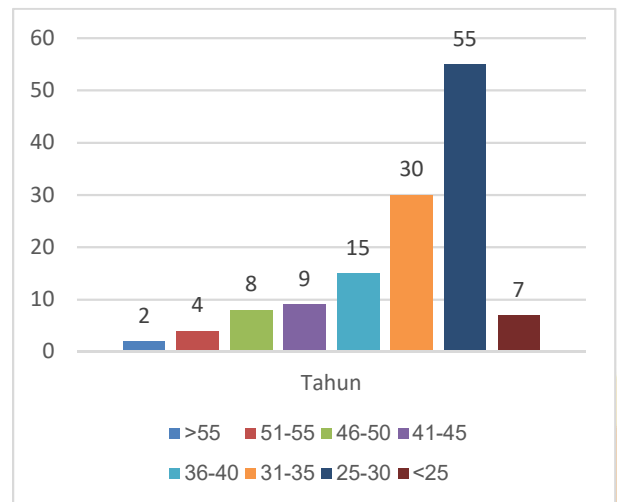
■ Laki-laki ■ Perempuan

Gambar 2 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Golongan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pegawai PNS Berdasarkan Unit Kerja



Pegawai PNS Berdasarkan Usia



Gambar 3 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Unit Kerja dan Usia

Tabel 1 Profil Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional				Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	
1	JF Pemeriksa	-	81	10	3	94
2	JF Arsiparis	-	1	-	-	1
3	JF Analisis Kepegawaian	-	2	1	-	3
4	JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	-	1	-	1
5	JF Pranata Humas	-	1	-	-	1
6	JF Pranata Komputer	1	1	1	-	3
Total						103

Tabel 2 Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan Lainnya

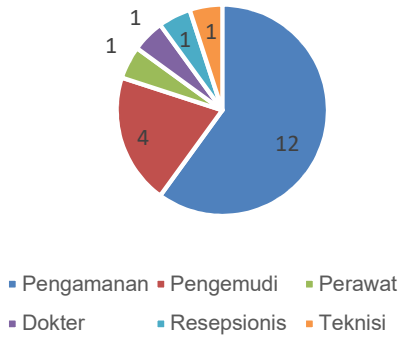
No.	Jabatan Lainnya	Jumlah
1	Penelaah Teknis Kebijakan	4
2	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	3
3	Penata Keprotokolan	2
4	Pengolah Data dan Informasi	6
5	Dokumentalis Hukum	1
6	Pengadministrasi Perkantoran	1
7	Administrasi Umum	3
Total		20

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

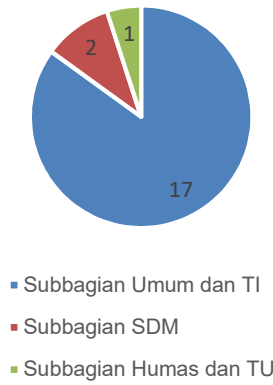
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menempati jabatan sebagai Arsiparis Ahli Pertama yang ditempatkan di Subbagian Umum dan TI dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan pendidikan terakhir S-1.

Statistik Pegawai Tenaga Tidak Tetap (TTT)

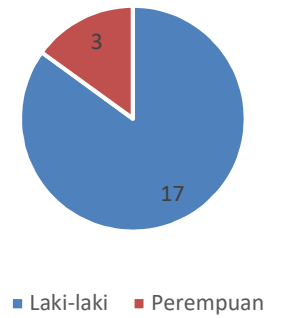
Pegawai TTT Berdasarkan Jabatan



Pegawai TTT Berdasarkan Unit Kerja

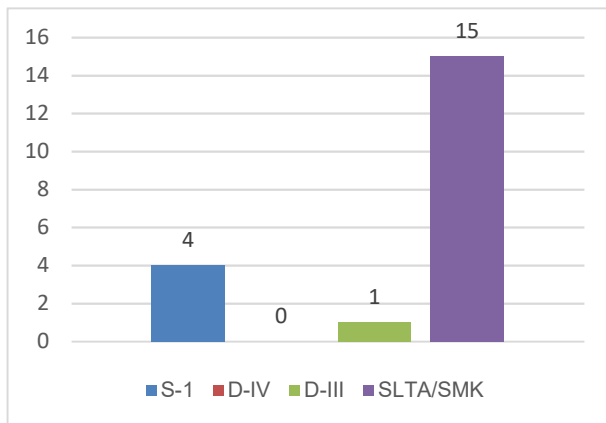


Pegawai TTT Berdasarkan Jenis Kelamin

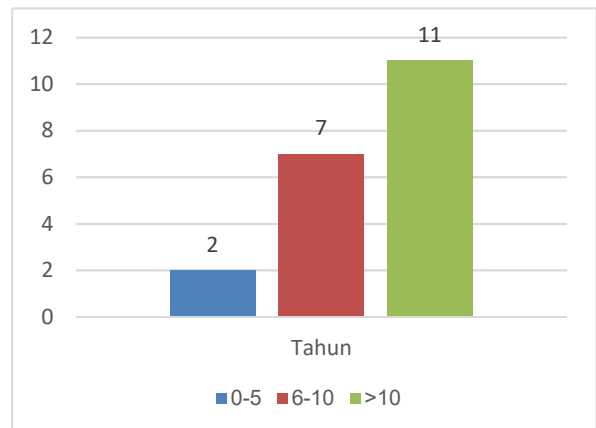


Gambar 4 Profil Pegawai TTT Berdasarkan Jabatan, Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Pegawai TTT Berdasarkan Pendidikan



Pegawai TTT Berdasarkan Masa Kerja



Gambar 5 Profil TTT Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja

2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2023 setelah melalui revisi anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp11.617.760.000,00 dengan target 288 volume rincian output dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian dan Anggaran RKP Tahun 2023

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.U28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	6.924.939.000	28 LHP
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	270.683.000	147 LHP
3	1043.FAF.U76	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.956.959.000	23 LHP
4	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	458.805.000	30 Laporan
5	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	187.700.000	30 Laporan
6	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.779.000	1 Laporan
7	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	695.409.000	12 Laporan
8	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	113.986.000	2 Laporan
9	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	7.500.000	15 Laporan
Jumlah (1 s.d.9)			11.617.760.000	288

Adapun untuk anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) pada Tahun 2023 setelah melalui revisi anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp15.420.270.000,00 dengan target 452 volume rincian output dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian dan Anggaran RKSP Tahun 2023

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.154.000.000	20 Laporan
2	1043.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi	290.578.000	17 Unit
3	1043.EBB.951	Layanan Sarana Internal	819.816.000	414 Unit
4	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.155.876.000	1 Layanan
Jumlah (1 s.d. 4)			15.420.270.000	452

E. ISU STRATEGIS

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Dalam perkembangannya terdapat beberapa isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Masih terdapat pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini;
2. Perlunya penguatan implementasi nilai-nilai dasar untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK;
3. Pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP yang diterbitkan;
4. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
5. Efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan agar kepuasan dirasakan oleh para pemangku kepentingan;
6. Praktik-praktik terbaik BPK belum sepenuhnya direplikasi dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengingat periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dibandingkan dengan RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

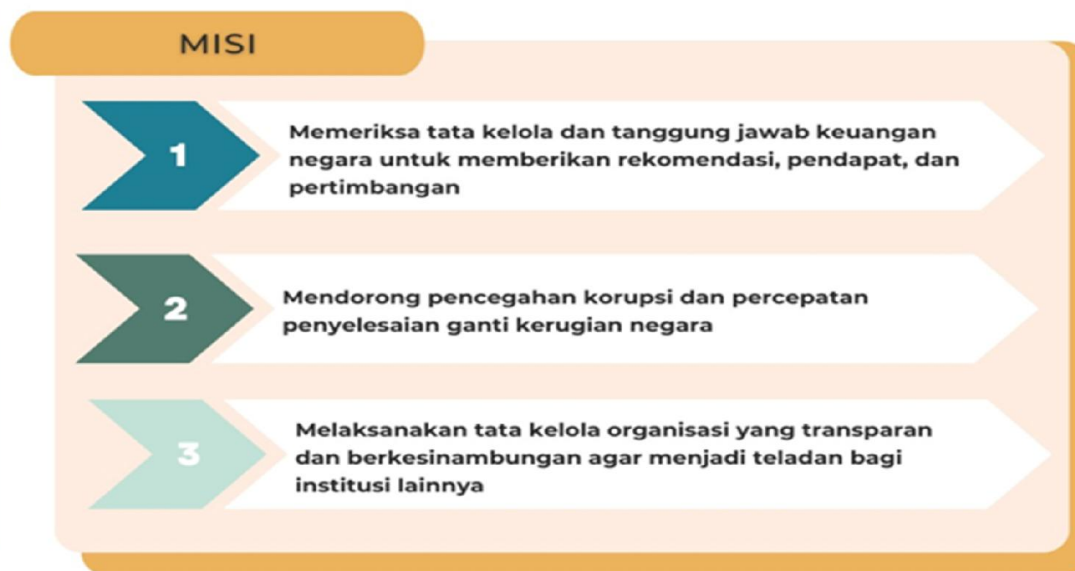
Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi sebagai berikut.



Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.



Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut.

TUJUAN
BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020-2024

“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan
Negara yang Berkualitas dan
Bermanfaat”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS
BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020-2024

“Meningkatnya Pemeriksaan yang
Bermutu Tinggi”

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Strategi ini merupakan bentuk perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. BPK juga selalu berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 6 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

Adapun sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dua sasaran sebagai berikut.



Berikut visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 7 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator-indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- 2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- 4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- 5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- 6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- 7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- 8) Hasil Evaluasi AKIP;
- 9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- 10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- 12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- 13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang merepresentasikan komitmen kinerja yang ingin dicapai oleh satuan kerja yang berisi Sasaran Kegiatan, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku eselon II sebagai pihak yang berkomitmen dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI selaku atasan langsung pada Desember 2022.

Dalam pelaksanaannya anggaran Sasaran Kegiatan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengalami perubahan hal ini dikarenakan karena adanya penambahan anggaran BA BUN, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. Anggaran semula sebesar Rp22.212.274.000,- menjadi sebesar Rp27.038.030.000,-.

Berikut Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusradi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CPA., ACPA., FCPA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selalu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

ESELON I
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp22.212.274.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp9.868.817.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengawasan	100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp12.343.457.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	4 (89,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Laode Nusradi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CPA., ACPA., FCPA.

Pihak Pertama,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.

Gambar 8 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Tabel 5 Perubahan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp22.212.274.000,-	Rp27.038.030.000,-
➤ Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp9.868.817.000,-	Rp11.617.760.000,-
➤ Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp12.343.457.000,-	Rp15.420.270.000,-

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 memuat target tahunan yang dijabarkan menjadi target triwulanan serta berisi rencana kegiatan yang tertuang dalam RKP/RKSP dalam pencapaian target kinerja setiap periodiknya. Berikut beberapa kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

Tabel 6 Kegiatan Utama dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja		Kegiatan Utama
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); 2. Pembentukan Tim Perencanaan Pengkaji Pemeriksaan; 3. Melaksanakan <i>cross review</i> atas penyusunan LHP untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan; 4. Pembentukan Tim Reviu Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan; 2. Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan; 3. Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong entitas agar segera melakukan penyelesaian rekomendasi BPK dengan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL; 2. Menginventarisir rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan membuat alternatif penyelesaian rekomendasi yang disetujui Kepala Perwakilan dan Usulan ke Tortama KN VI dan Anggota VI; 3. Penyusunan action plan atas LHP yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai.

Indikator Kinerja		Kegiatan Utama
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional; 2. Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional yang ditetapkan BPK; 3. Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan strategic paper pemeriksaan; 4. Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan; 2. Mengalokasikan tenaga pemeriksa; 3. Untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal; 2. Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik lokal yang ditetapkan; 3. Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan strategic paper pemeriksaan; 4. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD; 2. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP; 3. Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja; 4. Membuat pernyataan independensi untuk seluruh pelaksanaan pemeriksaan; 5. Melakukan sosialisasi layanan aplikasi live chat sebagai sarana pengaduan stakeholders terhadap nilai IIP pemeriksa.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; 2. Melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk penilaian AKIP Tahun 2023;

Indikator Kinerja		Kegiatan Utama
		3. Melakukan evaluasi kinerja untuk setiap triwulannya.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL); 2. Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut; 3. Mengomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun best practice Tahun 2023; 2. Menyusun replikasi best practice Tahun 2023; 3. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkala dan berkesinambungan.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; 2. Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat entry briefing; 3. Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak auditee; 4. Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan Diklat; 2. Mengajukan proposal penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pada Kantor Perwakilan; 3. Menginventarisir tingkat pemenuhan jam diklat dan mendorong pegawai untuk memenuhi jam diklatnya; 4. Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai.
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2023 dan Kebijakan TA 2023; 2. Menyusun dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja;

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 264 1382 376">3. Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah;<li data-bbox="762 387 1382 499">4. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK.

A. HASIL EVALUASI AKIP

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2021, maka terdapat perubahan metode evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2023.

Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Perubahan metode evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana nilai evaluasi tersebut atas AKIP Tahun 2022 sebesar **90,50** dengan predikat **AA (sangat memuaskan)**. Perolehan nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan nilai AKIP Tahun 2021 yaitu sebesar **94,09** dengan predikat **AA (sangat memuaskan)**.

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal terdiri dari penilaian atas komponen-komponen sebagai berikut.

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan/atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (manfaat) antara tujuan evaluasi dan kendala yang dihadapi.

Atas lingkup dan metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP tersebut, hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan kedepan yaitu.

1. Diperlukan adanya inovasi yang layak menjadi percontohan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional.
2. LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Atas hasil evaluasi tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berusaha meningkatkan kinerja dengan berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Inspektorat Utama dalam melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki komponen penilaian yang masih perlu mendapat perhatian.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reuiu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian Sasaran Strategis ini dinilai melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka capaian kinerja Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa kegiatan meliputi.

- a. Melakukan validasi atas target kinerja Tahun 2022;
- b. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022;
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja Tahun 2022;
- d. Melakukan inventarisasi atas permasalahan pencapaian kinerja pada tahun berjalan; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong pencapaian kinerja dan mengatasi kendala yang dihadapi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 memperoleh skor capaian kinerja sebesar **99,15**. Skor ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian

kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar **100,64**. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 9 Tren Skor Kinerja Tahun 2021 s.d. 2023

Dari gambar diatas menunjukkan penurunan skor kinerja jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih adanya hal-hal yang perlu perbaikan atas capaian kinerja Tahun 2023. Terdapat realisasi indikator kinerja mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya diantaranya yaitu IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diukur berdasarkan pencapaian atas 13 (tiga belas) IKU yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	72,80%	72,80%	72,8
1.1	Hasil QA dan QC Satker		100%		
1.2	Hasil Evaluasi EPP		54,67%		
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100
2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		13		
2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		13		
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,80%	107,73%	105

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		12.457		
3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		2.713		
3.3	Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		280		
3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		142		
3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		15.592		
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,09%	101,09%	101,09
4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya		5		
4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya		5		
4.3	Alokasi penambahan skor		1,09		
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100
5.1	(REF) Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait		-		
5.2	Alokasi penambahan skor		-		
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100
6.1	Realisasi pemeriksaan tematik lokal		-		
6.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		-		
6.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		-		
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Baik (4,71)	94,20%	94,2
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (90,50)	101,69%	101,69
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100%	102,04%	102,04
9.1	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM		100%		
9.2	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN		100%		
9.3	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP		100%		
9.4	Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP		100%		
9.5	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL		100%		
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	110%	105
10.1	Tingkat Penyusunan <i>Innovative Practice</i>		100%		
10.2	Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan		120%		

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,72)	97,89%	97,89
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100
12.1	Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		127		
12.2	Jumlah seluruh pegawai		127		
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	91,55%	103,45%	103,45
13.1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		86,02%		
13.2	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		99,85%		
Skor Kinerja					99,15

Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat tiga Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - c. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.
2. Terdapat empat Indikator Kinerja sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;
 - c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - d. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat enam Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;
 - d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 - e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - f. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	Realisasi			
		Tahun 2023 (3)	Tahun 2023 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2021 (6)	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	72,80%	90,63%	90,63%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,80%	85,16%	83,11%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,09%	100,90%	100,38%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,14%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,46%	100,39%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Baik (4,71)	Sangat Memuaskan (4,45)	Sangat Memuaskan (4,40)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (90,50)	AA (94,09)	AA (96,59)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100%	98,95%	99,66%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	120%	170,83%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,72)	Memuaskan (3,99)	Sangat Memuaskan (4,08)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	91,55%	91,81%	91,78%

Selanjutnya perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja	Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	
	2020	2021	2022	2023	2024			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	72,80%	72,80%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	80,80%	107,73%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,09%	101,09%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,71	94,20%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (90,50)	100,50%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	110%	110%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,72	97,89%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	91,55%	103,21%

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2023 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1**Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu ltama.

Hasil QA dan QC merupakan Pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK.

Tujuan

Untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara

Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	86,67%	90,63%	90,63%	72,80%	-
Capaian Realisasi	86,67%	90,63%	90,63%	72,80%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+3,96	-	-17,83	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	86,67%	90,63%	90,63%	72,80%	-

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 72,80% dari target 100%. Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan Tahun 2023. Realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan atas kualitas LHP yang diterbitkan.

Pengukuran IKU ini melalui dua sub IKU yaitu.

- a. Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100%. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 25 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Pengendalian mutu (*Quality Control*) dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam pemeriksaan, serta menjadi dasar penilaian atau kriteria atas mutu pemeriksaan untuk kegiatan sebelum sampai dengan setelah pemeriksaan dilakukan.
- b. Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi LHP (bobot 60%) dengan realisasi sebesar 54,67%. Capaian ini berdasarkan hasil evaluasi LHP yang dilakukan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) atas LHP yang dimuat dalam IHPS I Tahun 2023. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 54,67% (terdapat 14 LHP dari 15 LHP yang di evaluasi terdapat temuan konsistensi) dan tingkat akurasi LHP sebesar 86,67% (terdapat 2 LHP dari 16 LHP yang di evaluasi terdapat temuan akurasi).

Jika dibandingkan dengan pengukuran IKU pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat perbedaan metode pengukuran dimana capaian hasil reuiu Itama tidak menjadi aspek pengukuran.

Adapun upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian IKU ini yaitu:

- a. Merencanakan dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
- b. Membentuk Tim Perencanaan Pengkaji Pemeriksaan;
- c. Melaksanakan *cross review* atas penyusunan LHP untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk meningkatkan pencapaian namun capaian masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya temuan konsistensi dan akurasi atas LHP yang diterbitkan. Adapun salah satu kendala yang dihadapi yaitu waktu pemeriksaan yang bertepatan dengan hari raya dan cuti bersama Idul Fitri sehingga efektivitas penyusunan LHP kurang dapat dimaksimalkan.

Untuk perbaikan tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya untuk:

1. Mengevaluasi pencapaian dan mengoptimalkan aktivitas yang telah direncanakan yang tertuang dalam rencana aksi;
2. Memastikan setiap tahap pemeriksaan yang dijalankan oleh tim pemeriksa telah melalui proses QA dan QC oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP);
3. Untuk memitigasi risiko terjadinya permasalahan yang sama, Tim Pemeriksa menunjuk satu Anggota Tim yang bertugas dalam verifikasi akurasi dan konsistensi LHP;
4. Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam proses reviu hasil pemeriksaan.

Realisasi IKU 1 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 72,80 % atau belum memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Untuk kedepannya diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan hingga Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas reviu hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tujuan

Untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. realisasi IKU ini sama dengan realisasi pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Adapun upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan;
- b. Melakukan diseminasi harapan dan tujuan penugasan telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemeriksaan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
- d. Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan 8 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya Semester I 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Katingan;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau;
12. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 Kabupaten Gunung Mas;
13. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 Kabupaten Barito Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mempertahankan capaian ini pada tahun selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dengan merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024.

IKU 3

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sejak Tahun 2005. Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP.

Tujuan

Untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	85,32%	83,11%	85,16%	80,80%	-
Capaian Realisasi	113,76%	110,81%	113,55%	107,73%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-1,40	-2,21	+2,05	-4,36	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	113,76%	110,81%	113,55%	107,73%	-

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 80,80% dari target 75% yang ditetapkan pada Tahun 2023. Realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 namun masih diatas target yang ditetapkan pada Tahun 2023.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan realisasi Sub IKU berikut:

- a. Sub IKU 3.1 yaitu jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 12.457;
- b. Sub IKU 3.2 yaitu jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebesar 2.713;
- c. Sub IKU 3.3 yaitu jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 280;
- d. Sub IKU 3.4 yaitu jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebesar 142;
- e. Sub IKU 3.5 yaitu jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* sebesar 15.592.

Selama tahun berjalan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara periodik, baik dalam periode bulanan, triwulanan maupun semesteran;
2. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan dengan entitas dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.



Gambar 10 Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2023

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya yaitu penambahan jumlah rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan para periode berjalan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tindak lanjut yang disampaikan entitas.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan capaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 107,73%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024 dengan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dengan melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merealisasikan anggaran sebesar Rp456.959.360,- atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp458.805.000,- yang dialokasikan Tahun 2023. Realisasi ini atas Rincian Output (RO) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan.

IKU 4

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

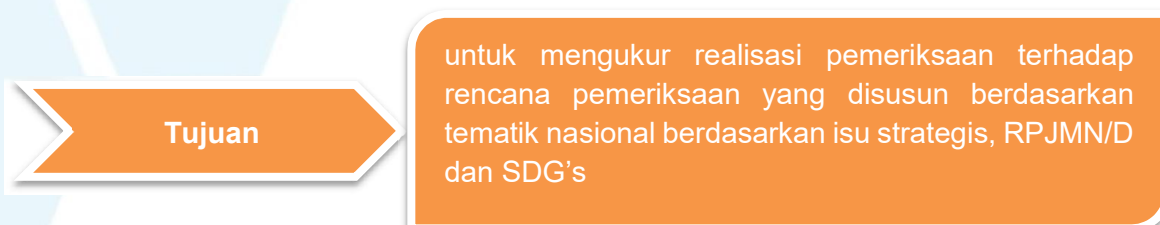
Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu Unit Kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.



Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,89%	100,38%	100,90%	101,09%	-
Capaian Realisasi	100,89%	100,38%	100,90%	101,09%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-0,51	+0,52	+0,19	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,89%	100,38%	100,90%	101,09%	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 101,09% dari target 100% yang ditetapkan pada Tahun 2022. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan peran aktif keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional.

Pada Tahun 2023, sebagai upaya pencapaian IKU ini yaitu dengan merencanakan dan ikut serta dalam pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan lima pemeriksaan tematik nasional yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya Semester I 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya;
5. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya.

Faktor keterbatasan sumber daya pemeriksa dan anggaran pemeriksaan memberikan hambatan dalam keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 4 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100,90%. Realisasi ini telah melebihi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Adapun upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempertahankan atau meningkatkan IKU ini yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Dukungan anggaran untuk pencapaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar Rp2.344.395.000,- atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp2.344.395.000,- yang dialokasikan Tahun 2023. Realisasi ini dihitung berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas lima pemeriksaan tematik nasional baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan terinci.

IKU 5

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Tujuan

untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100,14%	100%	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100,14%	100%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	+0,14	-0,14%	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100,14%	100%	-

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi IKU ini mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan tidak ada pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk memfasilitasi jika ada permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Sampai akhir periode Tahun 2023, tidak ada permintaan atas pemeriksaan tersebut dari para pemangku kepentingan. Dari formula perhitungan yang telah ditetapkan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan realisasi IKU akan tetap 100%. Namun jika ada akan ada alokasi penambahan skor.

Adapun salah satu kendala untuk meningkatkan capaian IKU ini sangat bergantung kepada adanya pemenuhan pemeriksaan kepentingan sehingga capaian pada Tahun 2023 lebih rendah dari capaian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100% atau sama dengan target yang diharapkan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

IKU 6

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.



untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's

Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,39%	100,46%	100%	-
Capaian Realisasi	100%	100,39%	100,46%	100%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+0,39%	+0,07	-0,46	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100,39%	100,46%	100%	-

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Hal ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 tidak terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemenuhan IKU ini yaitu dengan menganalisis atas beberapa tema pemeriksaan yang ditetapkan sebagai pemeriksaan tematik lokal namun dengan memperhatikan isu yang terjadi di daerah, pemeriksaan lebih dipusatkan kepada tema pemeriksaan tematik nasional.

Faktor keterbatasan sumber daya pemeriksa dan anggaran pemeriksaan dapat memberikan hambatan dalam keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 6 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Untuk meningkatkan capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya

berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

IKU 7

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

- ⇒ 4,00 - 5,00 = sangat baik
- ⇒ 3,00 - 3,99 = baik
- ⇒ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ⇒ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Tujuan

untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,42	4,40	4,45	4,71	-
Capaian Realisasi	88,40%	88%	89%	94,20%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-0,34	-0,02	+0,05	+0,26	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	88,40%	88%	89%	94,20%	-

Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 sebesar 4,71 (sangat baik) dari target 5,00 yang ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Namun demikian, realisasi IKU 7 pada Tahun 2023 masih dibawah target yang telah ditetapkan. Adapun kendala pencapaian IKU ini yaitu proses internalisasi kepada pegawai terkait implementasi nilai-nilai dasar masih belum optimal.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan capaian IKU ini yaitu dengan melakukan proses internalisasi kepada pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar, dan kepatuhan terhadap kode etik melalui sosialisasi atau pengarahan Kepala Perwakilan dalam rangka persiapan pemeriksaan.

Adapun upaya untuk peningkatan capaian tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan pengawasan implementasi nilai dasar BPK secara berkala serta mengadakan *coaching* dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari.

Persentase realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 94,20% dari target Tahun 2024 atau belum memenuhi target Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar.

IKU 8

Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

1. *Self-assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK;
2. Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Predikat penilaian Hasil AKIP adalah sebagai berikut.

AA (>90-100)

Sangat Memuaskan

Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A	(>80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan tata Kelola berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	(>70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 satuan kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator
B	(>60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 satuan kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon 2
CC	(>50-60)	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.
C	(>30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D	(0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tujuan

Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK

Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
Realisasi	AA (94,39)	AA (96,59)	AA (94,09)	AA (90,50)	-
Capaian Realisasi	109,76%	111,02%	106,92%	101,69%	-
Perubahan Realisasi (▲)	+5,49	+2,2	-2,5	-3,59	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,82%	107,26%	104,49%	100,50%	-

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 sebesar 90,50 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dari target 89,00. Realisasi ini menunjukkan telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, realisasi ini mengalami penurunan namun masih diatas target Tahun 2023. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan metode evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2023 dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pencapaian IKU ini sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
2. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai bukti (*evidence*) komponen-komponen penilaian yang tertuang dalam lembar kerja evaluasi;
3. Melakukan *self-assessment* atas evaluasi AKIP Tahun 2023.

Atas hasil evaluasi tersebut dan untuk meningkatkan capaian tahun selanjutnya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menyempurnakan upaya-upaya inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung implementasi SAKIP;
2. Menyempurnakan pemenuhan *cascading* kinerja dari level pimpinan hingga ke level individu baik di tahap perencanaan, pengukuran, maupun monitoring dan evaluasinya secara berkala sesuai dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3. Menyempurnakan Laporan Kinerja unit kerja eselon I agar sesuai dengan PermenpANRB Nomor 53 Tahun 2014; dan
4. Meningkatkan capaian kinerja baik yang bersifat output maupun outcome sehingga status tindak lanjut atas rekomendasi AKIP BPK agar memperoleh hasil yang optimal.
5. Mengoptimalkan kinerja Tim Identifikasi Resiko Perwakilan untuk mendapatkan profil resiko dan identifikasi permasalahan yang lebih utuh dan berkontribusi lebih dalam evaluasi kinerja.

Persentase realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 jika dibandingkan target Tahun 2024 sebesar 100,50% atau telah melebihi target Tahun 2024. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

IKU 9

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL)

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas

Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Tujuan

untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	99,16%	99,66%	98,95%	100%	-
Capaian Realisasi	104,38%	103,81%	102,01%	102,04%	-
Perubahan Realisasi (▲)	+0,17	+0,5	-0,71	+1,05	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,16%	99,16%	98,95%	100%	-

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2023 sebesar 100 dari target 98% atau diatas target Tahun 2023. Realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Adapun salah satu hambatan tingkat ketercapaian IKU ini bergantung pada partisipasi aktif pegawai.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan pencapaian IKU ini diantaranya yaitu:

- a. Memonitoring pemutakhiran data kepegawaian oleh pegawai pada SISDM (antara lain riwayat LHKPN, SPT, tempat tinggal dan informasi pegawai);
- b. Mendorong seluruh pejabat struktural untuk menindaklanjuti seluruh surat masuk pada aplikasi JASMIN;
- c. Mendorong pemeriksa untuk memanfaatkan aplikasi SiAP pada setiap jenis pemeriksaan;

- d. Memonitor secara berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas pada aplikasi SiPTL;
- e. Menonitor penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP.

Pengukuran realisasi ini tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 100% dengan rincian Sub IKU sebagai berikut:

- a. Realisasi Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (bobot 20%) sebesar 100%;
- b. Realisasi Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (bobot 15%) sebesar 100%;
- c. Realisasi Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (bobot 20%) sebesar 100%;
- d. Realisasi Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP (bobot 20%) sebesar 100%;
- e. Realisasi Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL sebesar 100%.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada Tahun 2023 jika dibandingkan target Tahun 2024 sebesar 100% atau telah memenuhi target Renstra Tahun 2024.

Adapun upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya yaitu dengan cara:

- a. Melakukan monitoring pemanfaatan teknologi dan informasi secara berkala;
- b. Meningkatkan kesadaran pegawai baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI.

IKU 10

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovatice Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

1. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*;
2. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Tujuan

untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	200%	170,83%	120%	110%	-
Capaian Realisasi	200%	170,83%	120%	110%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-29,17	-50,83	-10	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	200%	170,83%	120%	110%	-

Realisasi IKU 10 Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan Tahun 2023 sebesar 110% dari target 100% atau diatas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas realisasi IKU ini mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Hal ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 hanya menyusun satu *innovative practice* dan tidak menyampaikan penerapan *best practice*.

Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan atas realisasi Sub IKU berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 10.1 Tingkat Penyusunan *Innovative Practice* (bobot 50%) sebesar 100%. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyusun *best practice* yang berjudul "**Buku Saku Tenang Berperjalanan Dinas**".
- b. Realisasi Sub IKU 10.2 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (bobot 50%) sebesar 111,67%. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan dengan jumlah 29 aktivitas dengan rincian sebagai berikut.
 - Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 1 aktivitas;
 - Bantuan Rekan Sejawat (*Peer Assist*) sebanyak 16 aktivitas;
 - Mentoring sebanyak 4 aktivitas;
 - Evaluasi Pasca Kegiatan sebanyak 1 aktivitas;
 - Forum Berbagi Pengetahuan sebanyak 5 aktivitas;
 - Blogging sebanyak 2 aktivitas.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian IKU ini antara lain yaitu:

- a. Mendorong pegawai untuk menerapkan manajemen pengetahuan;
- b. Mendorong unit kerja untuk mengusulkan inovasi yang telah dilakukan sebaga *best practice*;
- c. Menginisiasi penyelenggaraan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) hasil diklat.



Gambar 11 Kegiatan KTF *Big Data Analytic*

Adapun kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu tidak semua pegawai mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian IKU 10 Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 110% atau telah memenuhi target Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini setiap tahunnya dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan baik terkait pemeriksaan maupun non pemeriksaan dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang ada di perwakilan untuk diusulkan sebagai *innovative practice* dan mengidentifikasi *best practice* dari satker lain untuk dapat diterapkan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

IKU 11

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Skala hasil survei sebagai berikut.

- ⇒ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan
- ⇒ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ⇒ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ⇒ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Tujuan

untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,96	4,08	3,99	3,72	-
Capaian Realisasi	104,21%	107,37%	105%	97,89%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+0,12	-0,09	-0,27	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,21%	107,37%	105%	97,89%	-

Berdasarkan tabel tersebut, Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2023 sebesar 3,72 (memuaskan) dari target 3,8 atau masih dibawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemangku kepentingan.

Adapun upaya peningkatan kualitas komunikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
2. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang BPK diantaranya dengan mengadakan *BPK Goes to School* dan melalui media sosial;
3. Melakukan standarisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial;
4. Memfasilitasi pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat menganalisis secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan penurunan atas pencapaian IKU ini. Sehingga untuk peningkatan pemahaman atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan masih belum dapat diketahui secara menyeluruh.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, persentase realisasi IKU 11 pada Tahun 2022 dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 97,90% atau belum memenuhi target Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan capaian IKU ini pada tahun selanjutnya dengan meningkatkan efektivitas dan kualitas

hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

IKU 12

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014);
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa;
4. Pengembangan kompetensi yang dimaksud Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Daiklat Kepemimpinan.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satuan Kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja lama.

Tujuan

untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, terdapat 126 pegawai dari total 126 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Realisasi ini sama dengan realisasi Tahun 2022.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 untuk dapat memenuhi capaian IKU ini yaitu:

- a. Menyampaikan informasi penawaran diklat kepada seluruh pegawai;
- b. Menyampaikan usulan peserta diklat tepat waktu;
- c. Melakukan monitoring pemenuhan jam pelatihan pegawai periodic dan menyampaikan laporan monitoring kepada para pejabat struktural selaku atasan langsung melalui Nota Dinas;
- d. Mendorong pegawai yang belum memenuhi jam pelatihan untuk mengikuti pelatihan pada triwulan berikutnya.

Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi yaitu;

- a. Keterbatasan kuota peserta diklat, ketersediaan tema diklat berikut kualifikasi persyaratan peserta diklat yang ditentukan oleh Badiklat PKN dan Balai Diklat beresiko menyebabkan pegawai tidak dapat memenuhi jam diklat karena tidak dipanggil meskipun telah mendaftar;
- b. Jam diklat yang ditawarkan bersamaan dengan jadwal penugasan lain;
- c. Masih terdapat pegawai kurang memiliki perhatian terhadap pentingnya pengembangan kompetensi.

Persentase realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Tahun 2024 sebesar 100%. IKU ini telah memenuhi target Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mengikutsertakan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat. Selain monitoring berkala pemenuhan jam diklat pegawai, khusus pada akhir triwulan III dapat dilakukan pemetaan jumlah pegawai yang belum memenuhi jam diklat untuk diprioritaskan mendaftar diklat pada triwulan IV atau mengadakan *inhouse training*.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan;
3. Pencapaian output;
4. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan

untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Cakupan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) meliputi EKA Reguler dan EKA Nonreguler sebagai salah satu instrumen penerapan berbasis kinerja.

Pelaksanaan EKA di lingkungan BPK pada tingkatan satuan kerja baik Satker Pengelola Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Satker Pengelola DIPA, yang mengukur atas

aspek implementasi dengan memperhitungkan empat variabel penilaian dengan komposisi setiap variabelnya sebagai berikut:

1. Capaian output dengan bobot 43,5%;
2. Efisiensi dengan bobot 28,6%;
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 18,2%;
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 9,7%.

Perkembangan capaian IKU 13 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 21 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
Realisasi	92,62%	91,78%	91,81%	91,55%	-
Capaian Realisasi	106,46%	104,89%	104,33%	103,45%	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-0,84	+0,03	-0,26	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,42%	103,47%	103,51%	103,21%	-

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran pada Tahun 2023 sebesar 91,55%% dari target sebesar 88,5% sehingga capaian realisasi sebesar 103,45%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar 86,02% atau dalam kategori **Baik**. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran sebesar 99,42%;
Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot pengukuran sebesar 9,7%.
2. Capaian Output sebesar 100%;
Capaian Output diukur dengan membandingkan antara realisasi volume Rincian Output (RO) dengan target Volume RO. Bobot pengukuran sebesar 43,5%.
3. Efisiensi sebesar 51,46%;
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi program. Bobot pengukuran 28,6%.
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 99,79%.

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Bobot pengukuran sebesar 18,2%.

Atas nilai EKA tersebut dan untuk perbaikan kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat guna/sasaran sehingga tercapainya output yang diinginkan;
- b. Menganalisis kegiatan yang menjadi prioritas serta mendahulukan kegiatan yang mendukung tercapainya output;
- c. Melakukan efisiensi biaya seperti pelaksanaan konsinyering di kantor dan pelaksanaan pertemuan melalui media daring.
- d. Memperhatikan capaian kinerja yang telah diperoleh Tahun Anggaran (TA) 2023 sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja TA 2024;
- e. Memastikan pencapaian RO TA 2023 dapat diselesaikan sesuai komitmen.

Adapun nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 99,85%. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA sebesar 100 (bobot pengukuran 10%). Nilai ini menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas kewajaran;
- b. Deviasi halaman III DIPA sebesar 100% (bobot pengukuran 10%). Nilai ini menunjukkan deviasi halaman III DIPA dalam batas toleransi;
- c. Penyerapan anggaran sebesar 99,24% (bobot pengukuran sebesar 20%). Nilai ini menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target/pola ideal;
- d. Belanja kontraktual sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 10%). Nilai ini menunjukkan penyampaian data kontrak yang tepat waktu;
- e. Penyelesaian tagihan sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 10%). Nilai ini menunjukkan Penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan;
- f. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99,85% (bobot pengukuran sebesar 99,85%). Nilai ini menunjukkan pengelolaan UP dan TUP masih perlu dioptimalkan;
- g. Dispensasi SPM sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 5%). Nilai ini menunjukkan pengajuan SPM yang benar dan dalam batas waktu yang ditentukan;
- h. Capaian output sebesar 100%(bobot pengukuran 25%). Nilai ini menunjukkan pencapaian output sudah sesuai target.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam upaya perbaikan atas nilai EPA ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mereviu kembali rencana kegiatan dan melakukan indentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja serta menyusun rencana aksi penanganan risiko dalam pelaksanaan anggaran;
- b. Aspek kepatuhan atas regulasi, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, serta penyelesaian tagihan tepat waktu;
- c. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM untuk menghindari retur SP2D, merealisasikan anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan triwulanan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Pegawai;
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, ketepatan waktu dalam penyampaian perencanaan kas dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN;
- e. Memantau capaian IKPA secara berkala melalui OM SPAN, agar dapat segera melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja;
- f. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini yaitu:

- a. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum sepenuhnya optimal sehingga menghambat penyelesaian output dan menurunkan kinerja anggaran;
- b. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana keuangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Konsistensi perencanaan dan penyerapan anggaran belum optimal karena waktu pelaksanaan yang berubah-ubah.

Dalam rangka meningkatkan IKU ini pada tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan;
- b. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK;
- c. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. Melibatkan segenap pemangku kepentingan dengan bersinergi secara kolaboratif, terorganisir dan terstruktur agar dapat memberiksan masukan dalam rangka peningkatan kinerja perwakilan pada periode berikutnya.

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 103,21% atau telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Penerapan Teknologi dan Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mendukung segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan cepat dan tentu saja dengan hasil yang baik, efektif, dan efisien.

Berikut upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disediakan BPK. Pemanfaatan ini memberikan dampak pengelolaan administrasi dokumen lebih cepat, efektif, dan efisien. Seperti pemanfaatan aplikasi Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN) dimana aplikasi ini digunakan untuk mengelola surat menyurat kedinasan internal/eksternal BPK yang meliputi administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, pendelegasian tugas dan tindak lanjut tugas. Hal ini sekaligus berdampak

kepada efisiensi belanja operasional seperti pembelian ATK dan belanja pengiriman dokumen. Untuk pengiriman surat eksternal dapat memanfaatkan *e-mail* atau aplikasi pengiriman pesan pada *handphone* jika *contact person* sudah diketahui.

- b. Penggunaan media daring untuk rapat dapat mengurangi biaya jamuan rapat dan biaya operasional lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.578.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp290.577.500,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50%.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Asas efisiensi pengelolaan BMN yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Upaya yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam efisiensi BMN diantaranya yaitu:

- a. Mendokumentasikan dokumen secara digital. Hal ini memberikan dampak dimana pemenuhan sarana dan prasarana dapat lebih efisien dimana dapat mengurangi belanja modal untuk pembelian lemari arsip atau sejenisnya dan ruang arsip dapat lebih efisien;
- b. Pemanfaatan BMN untuk pihak ketiga untuk meningkatkan penerimaan negara;
- c. Melakukan pemindahtanganan atau penghapusan BMN yang sudah tidak lagi diperlukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Sarana Internal dan Layanan

Prasarana Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp819.816.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp819.813.410,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50%.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM dapat meliputi seluruh aspek kegiatan untuk meningkatkan produktivitas. Secara sederhana dapat diasumsikan jika produktivitas sumber daya manusia tinggi, maka efisiensinya juga tinggi. Sebagai contoh, penempatan pegawai sesuai kemampuan dan beban unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, membuat lingkungan kerja dan ruang kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas kerja.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Manajemen Internal dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Gaji dan Tunjangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.159.773.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp8.136.928.705,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50,70%.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam efisiensi penggunaan anggaran diantaranya yaitu:

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat guna sehingga tercapainya output yang diinginkan. Seperti penganggaran belanja modal sesuai kebutuhan;
- b. menganalisis kegiatan yang menjadi prioritas serta mendahulukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya output;
- c. Melakukan efisiensi belanja operasional ATK dengan pemanfaatan aplikasi TIK;
- d. Melakukan efisiensi biaya konsinyering dengan melaksanakan konsinyering di Kantor.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Tahun 2023, nilai efisiensi atas kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 51,46%. Nilai ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian keluaran sebesar 51,46%.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus menumbuhkan identitas diri setiap pegawainya dan keterikatan terhadap organisasi dikarenakan adanya kesamaan nilai yang tertanam yang akan memudahkan setiap pegawai untuk saling memahami satu dengan yang lainnya sehingga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada bulan Juli Tahun 2021, budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan, yakni perubahan nama budaya kerja dari "MUSIK JAWA" menjadi "TANGGUH". Perubahan nama ini merupakan pengembangan dari budaya kerja sebelumnya, sehingga budaya kerja yang sekarang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Budaya kerja "TANGGUH" merupakan singkatan dari tujuh kata yang terdiri dari (Tepercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul, dan Harmonis), budaya kerja ini diharapkan dapat mengadaptasi Integritas, Independensi dan Profesionalisme sebagai bagian dari Nilai-Nilai Dasar dari BPK RI.

Penerapan budaya kerja “TANGGUH” dalam melaksanakan pekerjaan di lingkup pemeriksaan maupun non pemeriksaan antara lain sebagai berikut.

Tabel 22 Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Budaya Kerja	Perubahan Mekanisme Kerja/Pola Pikir
Tepercaya	Dalam bekerja senantiasa jujur sehingga memberikan rasa yakin kepada para pemilik kepentingan
Adaptif	Pegawai mampu menyesuaikan dengan kondisi, keadaan dan perubahan yang terjadi sehingga pekerjaan bisa dikerjakan secara optimal.
Netral	Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara objektif dan tidak memihak
Gesit	Dalam menangani permasalahan yang timbul, pegawai bisa cekatan dan responsif.
Guyub	Kerukunan dan kekompakan antar sesama pegawai selalu terjaga demi mencapai tujuan bersama
Unggul	Pandai dan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan
Harmonis	Selaras dan bekerja sama serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, diperlukan dukungan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
1	Rp11.617.760.000,-	Rp11.537.719.220,-	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp6.871.718.654,-	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
2			LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp270.683.000,-	
3			LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp2.954.070.452,-	
5			Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	Rp456.959.360,-	
6			Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	Rp185.323.500,-	

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
7			Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp1.760.000,-	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
8			Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp675.720.461,-	
9			Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp113.984.793,-	
10			Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp7.499.000,-	
11	Rp15.420.270.000,-	Rp15.392.799.838,-	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp1.150.283.338,-	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
12			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp290.577.500,-	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
13			Layanan Sarana Internal	Rp819.813.410,-	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
15			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp13.132.125.590,-	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi anggaran menunjukkan realisasi anggaran RKP dan RKSP Tahun 2023. Realisasi anggaran RKP sebesar Rp11.537.719.220,- menunjukkan realisasi **Sasaran “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”**. Sedangkan realisasi anggaran RKSP sebesar Rp15.392.799.838,- menunjukkan realisasi **Sasaran “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan**. Total realisasi RKP dan RKSP sebesar Rp26.930.519.058,- menunjukkan realisasi **Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”**.

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan inovasi dalam rangka perbaikan kinerja dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun inovasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hingga Tahun antara lain.

- **SIKOMPAK** (Sistem Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan) dan **PUKAT Kalteng** (Pusat Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah)

Dengan adanya dua inovasi ini, kebutuhan atas informasi dari pemangku kepentingan bisa terfasilitasi dengan lebih cepat dan tepat. Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya

inovasi ini yaitu IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

- **SIMPATIK** (Sistem Mediasi Percepatan Aksi TLRHP secara Intensif Komprehensif)
Inovasi ini dijalankan dengan mengidentifikasi rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang bersifat administratif, setelah itu pemerintah daerah didorong untuk menyelesaikan temuan tersebut. Dampak dari inovasi ini, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan. Capaian kinerja yang terbantu dengan inovasi ini yaitu IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- **SATPAM RUJAB** (Sistem Akses Terintegrasi Terpadu dengan Media Ruang Kerja Bersama)
Inovasi ini dibangun untuk memberikan manfaat yang memudahkan dalam penyediaan data dan bahan yang dibutuhkan sebagai bahan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan dari mana saja, serta memberikan sarana untuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara langsung walaupun pekerjaan dilakukan tidak dari kantor, sehingga dapat meningkatkan kualitas keluaran perwakilan dan mendukung pengumpulan dokumen dan data dalam menunjang capaian kinerja. Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya Satpam Rujab antara lain IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.
- **SI MONALISA** (Sistem Monitoring dan Analisa Aset Negara) dan **SI KLINIK** (Sistem Klinik)
Dengan adanya inovasi SI MONALISA penyajian informasi data BMN pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih akurat, Daftar Barang Ruangan (DBR) menjadi lebih *update*, setiap perubahan lokasi dan kondisi dapat dimutakhirkan secara *real time*. SIKLINIK memungkinkan Dokter dan perawat menginput pengadaan obat-obatan dan menginput data obat-obatan yang terpakai, nama pasien dan tindakan yang dilakukan. Setelahnya data dapat ditarik oleh admin (Subbagian Umum dan TI) untuk dibuat laporan perbulan. SI MONALISA DAN SI KLINIK juga sudah menjadi *innovative practice* yang diajukan ke Direktorat PSMK, untuk SI KLINIK sudah direplikasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya dua inovasi ini yaitu IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

1. **SIPENGEMBARA** (Sistem Percepatan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah terhadap Bendahara)

SIPENGEMBARA, membantu dalam pelaksanaan pemantauan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah khususnya terhadap Kerugian Daerah oleh Bendahara. Inovasi ini merupakan embrio *task force* yang akan ditetapkan oleh BPK Pusat.

Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya inovasi ini yaitu IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

➤ **SITEGAS** (Sistem Penegakan Gangguan Profesionalitas dan Integritas)

Inovasi ini memberikan kesadaran kepada pemerintah daerah dan juga pemeriksa BPK pentingnya mengutamakan Independensi, Integritas dan Profesionalisme dalam pemeriksaan. Teknis inovasi berupa pemberian kuesioner tentang Nilai-nilai dasar BPK yang disampaikan kepada entitas khususnya pejabat daerah setelah masa pemeriksaan oleh BPK berakhir.

Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya inovasi ini yaitu IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

G. PENGHARGAAN

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga meraih capaian dan prestasi baik dari internal BPK maupun dari eksternal, disajikan dalam tabel berikut.

1. Penghargaan Internal

- a. Penghargaan Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 di Pulang Pisau sebagai Terbaik Ketiga-Penilaian Kualitas LHP Laporan Keuangan Tahun 2022;
- b. Penghargaan Tim Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait pada Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 sebagai Terbaik Kedua -Penilaian Kualitas LHP Kinerja Tahun 2022;



Gambar 12 Piagam Penghargaan LHP Reward Tahun 2022

- c. Penghargaan Adi Kirtya Arthasantosha Kategori Satuan Kerja Perwakilan Tahun 2022;



Gambar 13 Piagam Penghargaan Adi Kirtya Arthasantosha Tahun 2022

- d. Penghargaan UJDIH BPK Perwakilan Zona Hijau Tahun 2022;
 e. Penghargaan sebagai Pengelola UJDIH BPK Perwakilan Terbaik Ketiga Tahun 2022;



Gambar 14 Piagam Penghargaan UJDIH Zona Hijau dan Pengelola UJDIH Terbaik Tahun 2022

- f. Piagam Penghargaan sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik BPK Perwakilan Terbaik Ketiga Tahun 2022.



Gambar 15 Piagam Penghargaan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan

2. Penghargaan Eksternal

- a. Penghargaan Vera Award Kategori DIPA Besar atas Kedisiplinan dan Kepatuhannya dalam Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Periode Semester I Tahun 2022 dengan Nilai 95,93 (Sangat Baik) sebagai Terbaik Pertama;



Gambar 16 Penghargaan Vera Award Kategori DIPA Besar

- b. Penghargaan atas Pencapaian Terbaik Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2023 Kriteria Pagu Besar Nilai Di Atas 21 Miliar;



Gambar 17 Piagam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2023

- c. Penghargaan atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2022 Mitra Kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah- Kategori UAPPA-W Kecil sebagai Peringkat Kedua;



Gambar 18 Penghargaan Kinerja Penyusunan Laporan UAPPA-W Tahun 2022

- d. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Peringkat Kedua.



Gambar 19 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP BAB IV –

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar **99,15** atau mengalami penurunan dari periode Tahun 2022 sebesar **100,64**. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan beberapa capaian realisasi kinerja.

Terdapat dua Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang masih dibawah target yang ditetapkan dan mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu.

- a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dengan realisasi sebesar 72,80% dari target sebesar 100% yang ditetapkan pada Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 90,63%.
- b. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dengan realisasi sebesar 3,72 dari target sebesar 5 yang ditetapkan pada Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,99.

Indikator Kinerja Utama yang mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya namun masih dibawah target yang ditetapkan yaitu IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 4,71 dari target 5 yang ditetapkan Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 4,45.

Terdapat enam Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang mengalami penurunan realisasi namun masih diatas target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar 80,80% dari target 75% yang ditetapkan pada Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 85,16%;
- b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan dengan realisasi 100% dari target 100% yang ditetapkan Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 100,14%;
- c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaa Tematik Lokal dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% yang ditetapkan Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 100,46%;
- d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP dengan realisasi sebesar 90,50% dari target sebesar 89% yang ditetapkan Tahun 2023 sehingga capaian realisasi sebesar 101,69%. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 94,09% dari target 88% sehingga capaian realisasi sebesar 104,49%;
- e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan realisasi sebesar 110% dari target 100% yang ditetapkan Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 120%;
- f. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran dengan realisasi sebesar 91,55% dari target sebesar 88,5% yang ditetapkan pada Tahun 2023 sehingga capaian realisasi sebesar 103,45%. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 91,81% dari target 88% sehingga capaian realisasi sebesar 104,33%.

Terdapat dua Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang realisasinya sama dengan tahun sebelumnya dan telah memenuhi target yaitu.

- a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan Tahun 2023;
- b. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan Tahun 2023.

Terdapat dua Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan diatas target yang ditetapkan yaitu.

- a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dengan realisasi sebesar 101,09% dari target 100% yang ditetapkan Tahun 2023. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 100,90%.

- b. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan realisasi sebesar 100% dari target 98% sehingga capaian realisasi sebesar 102,04%. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 97% dari target sebesar 88% sehingga capaian sebesar 102,01%.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas revidasi hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
- b. Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam proses revidasi hasil pemeriksaan;
- c. Meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan coaching dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari;
- d. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik melalui saluran komunikasi maupun lebih responsif dalam memenuhi permintaan dari para pemangku kepentingan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja diantaranya yaitu.

- a. Kecukupan waktu dalam penyusunan LHP mempengaruhi kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan hasil pemeriksaan;
- b. Keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat memberikan hambatan terhadap keterlibatan pemeriksaan tematik nasional dan lokal;
- c. Peran aktif pegawai dalam pemanfaatan teknologi dan informasi serta pemenuhan jam diklat dapat mempengaruhi capaian kinerja;
- d. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum sepenuhnya optimal sehingga menghambat penyelesaian output dan menurunkan kinerja anggaran;

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

- a. Menginventarisir hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya;
- b. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong pencapaian kinerja dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK RI dimasa yang akan datang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusradi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CPA., ACPA., FCPA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

ESELON I
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp22.212.274.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp9.868.817.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp12.343.457.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Laode Nusradi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CPA., ACPA., FCPA.

Pihak Pertama,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.

Lampiran 2

Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
1	Rp11.617.760.000,-	Rp11.537.719.220,-	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp6.871.718.654,-	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
2			LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp270.683.000,-	
3			LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp2.954.070.452,-	
5			Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	Rp456.959.360,-	
6			Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	Rp185.323.500,-	
7			Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp1.760.000,-	
8			Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp675.720.461,-	
9			Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp113.984.793,-	
10			Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp7.499.000,-	
11			Rp15.420.270.000,-	Rp15.392.799.838,-	
12	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp290.577.500,-			
13	Layanan Sarana Internal	Rp819.813.410,-			
15	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp13.132.125.590,-			

Lampiran 3

Tabel Target Indikator Kinerja dalam Lima Tahun Sesuai Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	
	2020	2021	2022	2023	2024			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	72,80%	72,80%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	80,80%	107,73%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,09%	101,09%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,71	94,20%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (90,50)	100,50%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	110%	110%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,72	97,89%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	91,55%	103,21%

Lampiran 4

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	Realisasi			
		Tahun 2023 (3)	Tahun 2023 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2021 (6)	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	72,80%	90,63%	90,63%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,80%	85,16%	83,11%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,09%	100,90%	100,38%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,14%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,46%	100,39%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Baik (4,71)	Sangat Memuaskan (4,45)	Sangat Memuaskan (4,40)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (90,50)	AA (94,09)	AA (96,59)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100%	98,95%	99,66%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	120%	170,83%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,72)	Memuaskan (3,99)	Sangat Memuaskan (4,08)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	91,55%	91,81%	91,78%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

TAHUN 2023

Unit/Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun : 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Pembentukan Tim Perencanaan Pengkaji Pemeriksaan LKPD TA 2022 Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 atas 15 entitas Melaksanakan <i>cross review</i> atau membentuk tim <i>checker</i> atas pemeriksaan Semester I untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan Semester I sesuai pedoman yang berlaku dan melakukan penyimpanan secara elektronik

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Reviu Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas • Pembentukan Tim Reviu Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) • Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II • Pelaksanaan KTF dengan tema yang berkaitan dengan pemeriksaan Semester II • Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Kinerja dan DTT Semester II • Melaksanakan <i>cross review</i> atau membentuk tim <i>checker</i> atas pemeriksaan Semester II untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan • Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan Semester II sesuai pedoman yang berlaku dan melakukan penyimpanan secara elektronik
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 • Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester I Tahun 2023 • Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2023 • Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan LKPD TA 2022 • Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan • Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan • Pembentukan Tim reviu Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim revidi infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan Pembentukan Tim revidi infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL Menginventarisir rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan membuat alternatif penyelesaian rekomendasi yang disetujui Kepala Perwakilan dan Usulan ke Tortama KN VI dan Anggota VI Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS) jika sesuai dengan alternatif penyelesaian yang telah disetujui Mendorong entitas agar segera melakukan penyelesaian rekomendasi BPK dengan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I Tahun 2022 dengan mengundang entitas baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i> dan melakukan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL Penyusunan <i>action plan</i> atas LHP Semester I yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai <p>Melakukan komunikasi dengan <i>auditee</i> untuk pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera melakukan penyelesaian rekomendasi BPK dengan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2022 dengan mengundang entitas baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i> dan melakukan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL Penyusunan <i>action plan</i> atas LHP Sem I yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional yang ditetapkan BPK <p>Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik lokal yang ditetapkan Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal <p>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik lokal Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja Surat Pernyataan Independensi pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan terinci LKPD Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terkait IIP Melakukan sosialisasi layanan aplikasi <i>live chat</i> sebagai sarana pengaduan <i>stakeholders</i> terhadap nilai IIP Pemeriksa Surat Pernyataan Independensi pelaksanaan pemeriksaan terinci Semester II Tahun 2022 Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan terinci Semester II Tahun 2023
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi • Melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk penilaian AKIP Tahun 2022
								<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi
								<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL) • Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut • Mengomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI • Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL) • Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut • Mengomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI • Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut Mengomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25% (1 Aktivitas MP)	37,5% (1 Aktivitas MP)	50% (1 Aktivitas MP)	100% (1 Aktivitas MP, 1 UBP)	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun sebelumnya Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan diklat Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan bantuan rekan sejawat (<i>peer assist</i>) Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan revidu pasca aktivitas (<i>after action review</i>) Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan revidu pasca aktivitas (<i>after action review</i>) Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Wawancara berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based interview</i>) Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan <i>Mentoring</i> Menyusun usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan bantuan rekan sejawat (<i>peer assist</i>); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan <i>Coaching</i>; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Forum Berbagi Pengetahuan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Forum Berbagi Pengetahuan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan revidu pasca aktivitas (<i>after action review</i>)
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i> Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i> Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i> • Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i> • Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i> • Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i> • Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i> • Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i> • Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembang an Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Mengajukan proposal penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Kantor Perwakilan • Melaksanakan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Kantor Perwakilan • Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Kantor Perwakilan • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan I Tahun 2023 <p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> pengembangan kompetensi pegawai Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan II Tahun 2023 <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan III Tahun 2023 <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Menyusun analisis kebutuhan pembelajaran Tahun 2023 Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai
IKU 13	Tingkat	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kinerja Anggaran							<p>TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2023 dan Kebijakan TA.2023 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023 Menyusun dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2023 dan Kebijakan TA.2023 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023 Menyusun dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2023 dan Kebijakan TA.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023 • Menyusun dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja • Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah • Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK • Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2023 dan Kebijakan TA.2023

Keterangan:

- Kolom (1) : *Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.*
Kolom (2) : *Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.*
Kolom (3) : *Diisi dengan Target Tahun 2023*
Kolom (4) s.d. (7) : *Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis Unit/Satuan Kerja dan juga target tahunan.*
Kolom (8) : *Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.*
Kolom (9) : *Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.*